
Public Value Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu

Novandi Bayu Permana^{1*}, Mukarto Siswoyo², Siti Khumayah³

Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia

Email: novandibayu225@gmail.com

*Correspondence

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Bagaimana Public Value Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Kaplongan Lor, Hambatan apa saja yang terjadi pada Public Value Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Kaplongan Lor, serta Upaya-upaya apa saja yang ditempuh untuk menangani hambatan Public Value Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Kaplongan Lor. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung serta pengamatan langsung ditempat penelitian. Adapun pembahasan yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut: 1) Public Value Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Kaplongan Lor masih terdapat beberapa hambatan yang menimbulkan public value (nilai publik) kurang optimal. 2) Hambatan Public Value Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Kaplongan Lor terjadi beberapa hal yaitu diantaranya kurangnya keterlibatan pemuda dan masyarakat sehingga merasa antipati terhadap kegiatan desa, Kerjasama pengurus yang kurang baik antara, masyarakat, pemuda, dan pemerintah desa. 3) Upaya penanggulangan dalam menangani hambatan yang terjadi pada Public Value Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Kaplongan Lor diantaranya yaitu Pembaharuan struktur organisasi yang ada di BUMDES guna menjadikan pengurus yang lebih semangat dan memiliki tujuan yang jelas, Pengambilan keputusan yang terukur dalam menentukan tujuan sehingga pembangunan desa dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

Keywords: nilai publik, badan usaha milik desa (bumdes), pemberdayaan.

ABSTRACT

This research examines and answers problems regarding the Public Value of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Empowering Youth in Kaplongan Lor Village, what obstacles occur to the Public Value of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Empowering Youth in Kaplongan Lor Village, and Efforts -What efforts are being made to overcome obstacles to the Public Value of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Youth Empowerment in Kaplongan Lor Village. This research is a type of qualitative research with in-depth interviews, observation, documentation and literature study. Field studies were carried out through interviews with key informants and supporting informants as well as direct observations at the research site. The discussion that can be described is as follows: 1) Public Value of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Youth Empowerment. In Kaplongan Lor Village, there are still several obstacles that cause public value (public value) to be less than optimal. 2) There are several obstacles to the Public Value of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Youth Empowerment in Kaplongan Lor Village, namely a lack of youth interaction and thus feeling antipathy towards village activities, poor management cooperation between the community, youth and village government. 3) Efforts to overcome obstacles that occur in the Public Value of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Youth Empowerment in Kaplongan Lor Village include updating the existing

organizational structure in BUMDES to create administrators who are more enthusiastic and have clear goals, making decisions that are clear. Measured in determining goals so that village development can be realized effectively and efficiently.

Keywords: *public values, village-owned enterprises (bumdes), empowerment*

PENDAHULUAN

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik (De Jong et al., 2017). Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi (Agustino, 2022). Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik pelaksanaan good governance yang diberikan oleh United Nation Development Program (UNDP) dalam (Rosadi & Purnomo, 2020), meliputi partisipasi (participation), penegakan hukum (rule of law), transparansi (transparency), daya tanggap (responsiveness), orientasi kepentingan umum (consensus orientation), kesetaraan (equity), efisiensi dan efektivitas (efficiency and effectiveness), akuntabilitas (accountability), dan visi ke depan (strategic vision). Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder) (Kristian, 2022). Partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat berpengaruh di dalam terlaksananya program yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, daerah, maupun desa (Maksudi, 2017). Dalam hal ini salah satu program yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa mengenai BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dimana menjadi program unggulan yang diharapkan oleh pemerintah pusat kepada Desa guna memaksimalkan potensi yang ada di desa tersebut (Alford et al., 2015).

Program BUMDES ini lah yang nanti nya akan meningkatkan produktivitas pengelolaan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut, dimana dari hasil program BUMDES ini diantaranya yaitu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat atau pemuda (Muhrman et al., 2023). Hal ini yang selalu di utamakan dalam pembangunan masyarakat desa sehingga Program BUMDES akan menjadikan Desa lebih mandiri, maju dan sejahtera (Kuantitatif, 2016). Pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa melalui kebijakan pemerintah desa setempat sudah di rencanakan oleh pemerintah pusat pada satu dekade sebelumnya dimana pemerintah desa memiliki wewenang yang lebih terhadap pengelolaan anggaran milik desa. “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendirian, Pengurusan dan Penatausahaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa” mendefinisikan BUMDES sebagai badan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa. Partisipasi langsung bersumber dari aset desa yang dimiliki oleh desa, dipisahkan untuk mengelola aset, pelayanan, dan operasional lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES dibentuk oleh pemerintah desa kemudian dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. BUMDES diciptakan untuk mewadahi seluruh kegiatan ekonomi yang dikelola oleh desa dan pelayanan publik atau kerjasama antar desa. Pengelolaan BUMDES dilakukan atas dasar masyarakat desa. BUMDES bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa dan mengembangkan perekonomian desa, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, BUMDES berperan penting sebagai penyedia layanan sosial kepada masyarakat dan menciptakan lapangan kerja dengan

bermitra dengan pihak ketiga atau desa lain. BUMDES dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan pokok desa (PADes).

Pengelolaan BUMDES yang optimal dapat memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan pemuda desa dalam meningkatkan potensinya. Hal ini tentunya BUMDES harus di kelola secara profesional dengan maksud dan tujuan yang jelas, mengacu pada target yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dan transparansi dalam melaksanakan program kerjanya. Sehingga BUMDES ini akan menjadi solusi bagi kesenjangan masyarakat desa setempat. BUMDES di harapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kehadiran BUMDES dapat membantu pemerintah desa dalam memberikan kontribusi meningkatkan potensi desa baik secara sumber daya manusia maupun sumber daya alam nya melalui pengelolaan yang kreatif, inovatif, dan memiliki orientasi kedepan, sehingga dapat membuka peluang untuk generasi muda dalam meningkatkan potensi dirinya dan ikut serta memajukan perekonomian Desa Kaplongan Lor Kabupaten Indramayu.

Pemerintah desa setiap tahun mengadakan MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan). Sesuai Undang-undang no. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang ini melibatkan berbagai elemen Masyarakat dan Lembaga desa dalam merumuskan pembangunan desa yang akan datang. Tujuan Musrenbang ini antara lain menampung aspirasi masyarakat, menentukan program dan menentukan anggaran. Dalam hal ini masyarakat dapat terlibat langsung dalam pembangunan desa dan penyampaian program secara faktual yang di saksikan oleh pemerintah setempat. Begitupun dengan BUMDES memiliki beberapa program yang dapat di rencanakan dalam pembangunan desa seperti halnya Simpan Pinjam, Pelatihan Kerja, UMKM, Ekonomi Kreatif dan Desa Wisata. Namun pada aplikasi di lapangan semua program yang di rencanakan dalam melibatkan partisipasi masyarakat itu tidak dilaksanakan secara optimal dan tidak melibatkan Masyarakat apalagi golongan muda lebih tidak diperhatikan suaranya. Dalam hal ini masyarakat banyak yang menilai pemerintah desa telah gagal melaksanakan tugasnya, terutama pengelolaan BUMDES yang tidak sesuai arah dan tujuannya.

Dalam hal ini sangat penting yang harus di capai dalam pengelolaan BUMDES adalah public value (nilai publik) dengan adanya keterbukaan, tanggung jawab, kepercayaan, kesejahteraan sosial, dan peningkatan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES di desa kaplongan lor. Menurut Bozeman (2007:11), public value adalah nilai dari publik yang merupakan hasil dari evaluasi tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar individu, kelompok dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang dipengaruhi dalam hubungannya dengan publik. Nilai publik juga dapat diciptakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik, dimana masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan primer maupun sekunder dengan adanya lembaga pemerintah yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Hal demikian dapat diciptakan ketika nilai publik yang hadir dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah ataupun lembaga setempat.

Pengembangan BUMDES ini di perlukan agar BUMDES yang sudah terbentuk dapat berfungsi sebagai perannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian permasalahan di dalam masyarakat terutama pemberdayaan pemuda dapat di selesaikan dengan baik, semua itu perlu adanya sinergitas pemerintah, masyarakat dan pemuda ikut aktif berperan dalam pembangunan desa sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan sosial.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan mencoba menggambarkan secara mendalam suatu objek penelitian yang berdasarkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Moleong, 2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu, karena penelitian yang digunakan bukan mencari suatu hubungan antar variabel melainkan penelitian ini dilakukan untuk menggali, menemukan dan menggambarkan tentang objek penelitian mengenai “Public Value terhadap Pengelolaan BUMDES dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Kaplongan Lor”.

Desain penelitian kualitatif yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Menurut Stake dan (Creswell, 2012), studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Studi kasus digunakan oleh penulis untuk memahami secara mendalam, holistik, dan komprehensif dari public value terhadap pengelolaan BUMDES dalam pemberdayaan pemuda di desa kaplongan lor. Informan yang dipilih merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi maupun kondisi latar dari objek penelitian. Adapun rincian informan dalam penelitian ini adalah:

- a) Informan Kunci (Key Informan) yaitu informan yang paling banyak mengetahui tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah Ketua Karang Taruna dan Masyarakat Kalangan Muda di Desa Kaplongan Lor
- b) Informan Pendukung (Supporting Informan) yaitu informan yang mengetahui tentang objek yang diteliti dan turut berpengaruh terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini, informan pendukung adalah Kepala Desa Kaplongan Lor, Pengurus BUMDES dan Pegawai Pemerintah Desa Kaplongan Lor. Teknik Pengumpulan Data melalui studi literatur / kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian ini, konsep penelitian yang akan dioperasionalkan adalah teori Public Value menurut (Dwiyanto, 2022) menjelaskan public value secara rinci dan jelas. bahwa public value dalam administrasi publik memiliki tiga makna yaitu: instusi yang beroperasi dalam urusan dan kepentingan publik; arena atau ruang Bersama; nilai-nilai bersama yang dimiliki oleh suatu komunitas atau bangsa. Teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yang lebih memfokuskan pada pemanfaatan sumber-sumber data. Analisis data dilakukan secara deskriptif dari keseluruhan data yang diperoleh untuk menggambarkan dan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana kenyataan yang sebenarnya. Analisis data deskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, Verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak Geografis Desa Kaplongan Lor berdasarkan koordinat letak pusat pemerintahan Desa antara 6,479690 lintang selatan dan 108,453250 bujur timur, dan wilayahnya berada di daerah daratan bukan daerah pesisir dengan ketinggian 1,7 m (diatas permukaan laut). Luas wilayah Desa Kaplongan Lor 2,712 km² terdiri dari 3 dusun, 3 rukun warga (rw), 12 rukun tetangga (rt), dan 12 perangkat desa. Orbirasi jarak dari pusat pemerintahan Desa Kaplongan Lor ke Ibu Kota Kecamatan Karangampel 2,3 km, Ibu kota Kabupaten Indramayu 25 km, Ibu Kota Propinsi Jawa Barat 188 km, dan Ibu Kota Negara 210 km. Desa Kaplongan Lor memiliki batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Karangampel Kidul Kec. Karangampel

Sebelah Selatan : Desa Kaplongan dan Desa Srengseng

Sebelah Barat : Desa Dukuh Jeruk Kec. Karangampel

Sebelah Timur : Desa Tanjungsari & Tanjungpura

Masyarakat Desa Kaplongan Lor

Berdasarkan data BPS tahun 2017 jumlah penduduk desa kaplongan lor yaitu 4.431 jiwa dengan terdiri dari pemilih tetap yaitu 3.447 (L : 1.754, P : 1.693). Desa kaplongan lor memiliki 12 RT dan 3 RW dimana kebiasaan masyarakatnya yaitu bertani, bercocok tanam, berdagang dan beternak. Desa kaplongan lor merupakan desa yang berada di ujung timur indramayu tepatnya di kecamatan karangampel.

Desa kaplongan lor memiliki potensi alam yang begitu besar dengan adanya sumber minyak bumi yang melimpah. Dan lahan pertanian yang luas menjadikan masyarakat gemar untuk bercocok tanam dan bertani. Seiring berjalannya waktu desa kaplongan lor menjadi lebih maju dan berkembang terlihat dengan adanya sarana pendidikan yang memadai dari mulai tingkat TK, SD/MI, SMP, SMA/SMK, dan Universitas hal ini membuktikan desa kaplongan lor mengalami pembangunan yang sangat pesat di bidang pendidikan, sarana, dan prasarana.

Struktur Perangkat Desa Kaplongan Lor

Pemerintah desa kaplongan lor saat ini sudah mengalami sudah mengalami beberapa kali perpindahan kepemimpinan dari mulai tahun 1980 an hingga saat ini menjadi desa kaplongan lor, pastinya dari masa ke masa memiliki perkembangan zaman yang berbeda pula dimana terlihat dari segi infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Adapun data kepemimpinan kuwu/kepala desa dari masa ke masa yaitu sebagai berikut :

Tabel 1			
Kepemimpinan Kuwu/Kepala Desa Dari Masa ke Masa			
No	N A M A	Tahun	Keterangan
	Asmadi	1982 – 1984	Pj
	Abdul Jalal	1985 – 1987	Pj (Ex Lebe)
	Shodikin	1988 – 1996	Pemilihan
	Mustakim	1997 – 1998	Pj (Tni Ad)
	Bukhori	1998 – 2008	Pemilihan
	Tabroni	2008 – 2014	Pemilihan
	Zamhari	2 Sept 2014 – 14 Jan 2015	Pj (Sekdes)
	Tabroni	2015 – 2021	Pemilihan
	Saidi	2021 – 2027	Pemilihan

Sumber : Staf TU Pemerintah Desa Kaplongan Lor

Pengelolaan BUMDES Desa Kaplongan Lor

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kaplongan Lor dibentuk pada tahun 2013 di masa kepemimpinan Bapak Kuwu Tabroni, yang di beri nama “BUMDES ADEM SARI” dimana dengan adanya BUMDES ini dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam kemajuan di desa kaplongan lor. Dan mulai saat itu desa kaplongan lor memiliki badan usaha milik desa untuk mewujudkan desa yang berdaya dan maju.

Disamping itu juga berdasarkan peraturan pemerintah No. 4 Tahun 2015 tentang peraturan pendirian, pengurusan, penatausahaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka pemerintah desa kaplongan lor mulai memberikan anggaran, membuat legalitas usaha, membentuk kepengurusan, dan merumuskan kegiatan/program yang akan dilaksanakan oleh BUMDES guna keberlangsungan nya agar lebih optimal.

Adapun logo dari BUMDES ADEM SARI yaitu sebagai berikut :



Gambar 1
Logo BUMDES ADEM SARI

Berdasarkan peraturan yang mengatur pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan pengembangan BUMDES di tingkat desa, yaitu diantaranya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan. Maka dengan adanya BUMDES harus mampu memberikan dampak terhadap kemajuan desa kaplongan lor yang lebih optimal.

Berdasarkan hasil musyawarah yang disepakati bersama antara masyarakat, pemuda dan pemerintah Desa Kaplongan Lor, maka dibentuklah pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Adem Sari periode tahun 2021-2027 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2
Pengurus BUMDES Desa Kaplongan Lor

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Apipudin	SMA	Ketua
2.	Andi Saandi	SMA	Wakil Ketua
3.	Wandi	SMA	Sekretaris
4.	Ibrohim	S1	Bendahara

Dengan terbentuknya kepengurusan BUMDES Desa Kaplongan Lor yang di ketuai oleh Bapak Apipudin dan pengurusnya, maka BUMDES melaksanakan kinerja yang telah di tetapkan setiap tahunnya dalam Musyawarah Desa untuk menjadikan BUMDES lebih bermanfaat dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Adapun rancangan agenda atau kegiatan BUMDES Desa Kaplongan Lor yaitu sebagai berikut :

Tabel 3
Rancangan Pengelolaan BUMDES periode 2021-2027

No.	Tahun	Kegiatan/Program	Sasaran
1.	2021	Pelatihan Las & Beserta Peralatan	Pemuda
2.	2022	Pengelolaan Lapangan Sepak Bola	Pemuda dan Masyarakat
3.	2023	Pemberian alat pertanian	Kelompok Tani
4.	2024	Pengelolaan Sampah	Pemuda dan Masyarakat
5.	2025	Pengelolaan Sampah	Pemuda dan Masyarakat

Public Value Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Kaplongan Lor

Public value adalah nilai untuk publik yang merupakan hasil dari evaluasi tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang dipengaruhi dalam hubungannya dengan publik. Dengan demikian, *public value* menyangkut kebutuhan-kebutuhan dasar individu, kelompok, dan masyarakat, baik kebutuhan fisik maupun non fisik. Kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi oleh organisasi atau institusi publik yaitu negara dan pemerintah. Bozeman (2007:11), melakukan penelitian Public Value Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Kaplongan Lor, dengan acuan teori (Dwiyanto, 2022), yaitu sebagai berikut :

Instansi yang beroperasi dalam urusan dan kepentingan publik

Institusi yang beroperasi harus sesuai dengan keinginan dan harapan publik bukan hanya sekedar kepentingan instansi saja. Disisi lain institusi yang beroperasi harus kooperatif membangun komunikasi yang baik bersama masyarakat dengan memberikan hak-hak nya dan ikut serta membangun bersama institusi yang sedang di jalankan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di lapangan terkait dengan parameter pengelolaan BUMDES untuk pemberdayaan pemuda dirasa masih kurang optimal terlihat beberapa informan yang merasa pengelolaan BUMDES kurang memprioritaskan pemberdayaan pemuda sehingga timbul rasa kurang memiliki dari pemuda itu sendiri dan dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan BUMDES untuk pemberdayaan pemuda masih tahap rancangan yang mana perlu adanya kerjasama yang baik antara pemuda, pengurus BUMDES dan Pemerintah Desa.

Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di lapangan terkait dengan parameter Hubungan Pengurus BUMDES dengan Kepentingan Publik yaitu masih belum sinkron antara kebutuhan masyarakat dan tugas dari pada pengurus BUMDES itu sendiri, sehingga timbul adanya perbedaan arah dalam membangun kinerja pengelolaan BUMDES tersebut. Berdasarkan hasil yang didapat dari informan di atas dapat penulis simpulkan bahwa komunikasi antara pengurus BUMDES dan kepentingan masyarakat masih kurang baik karena tidak adanya pencapaian tujuan yang jelas dan tidak adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program yang akan dilakukan oleh pengurus maupun masyarakat.

Serta berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan beberapa informan saat ini pada parameter penilaian konstituen mengenai pengelolaan BUMDES yaitu informan sudah menyampaikan cukup jelas seperti apa pengelolaan BUMDES saat ini yang ada di Desa Kaplongan Lor dimana rata-rata informan mengatakan kurang baik dari segi pengelolaannya, sumberdaya manusia pengurusnya, dan keterbukaan terhadap publiknya. Sehingga masyarakat menilai pengelolaan BUMDES hanya di nikmati oleh sekelompok orang saja dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan desa. Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa Dimensi Institusi yang beroperasi pada penilaian masyarakat mengenai pengelolaan BUMDES belum berjalan optimal. Karena masih banyaknya penilaian masyarakat yang kurang baik dan merasa tidak di berikan informasi terkait pengelolaan BUMDES tersebut sehingga timbul kurangnya respect masyarakat dan sikap yang apatis terhadap Pemerintah Desa.

Arena atau ruang bersama

Arena atau ruang bersama merupakan aspirasi, kebutuhan dan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari sebuah institusi yang dijalankan untuk kepentingan publik. Dan masyarakat di berikan haknya secara konstitusi untuk menyuarakan pendapatnya di ruang publik sebagai sarana untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan kebutuhan publik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di lapangan terkait dengan parameter keterlibatan pemuda dalam pengelolaan BUMDES dirasa masih belum terpenuhi antara keinginan dan kenyataan yang ada. Karena memang dari pemudanya sendiri banyak yang apatis dan kalo pun ada pemuda yang aktif justru dikira sebagai masalah dalam pembangunan desa, sehingga perlu adanya pendewasaan organisasi. Berdasarkan hasil tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan pemuda dan BUMDES masih belum sinkron, antara keinginan dan kenyataan. Sehingga akan menjadi penghambat percepatan pembangunan desa dimasa yang akan datang.

Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di lapangan terkait dengan parameter keinginan masyarakat dengan adanya bumdes mereka masih mengharapakan BUMDES agar aktif kembali dengan melibatkan masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan desa. Berdasarkan hasil tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat antusias dalam pembangunan desa, mereka menginginkan BUMDES sebagaimana tugas mestinya yaitu mensejahterakan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga hadirnya BUMDES dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dalam pembangunan desa.

Serta hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di lapangan terkait dengan parameter musyawarah bersama bahwa antara masyarakat, pemuda, BUMDES, dan Pemerintah Desa sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan musyawarah bersama sudah berjalan dengan baik. Walaupun ada sebagian masyarakat yang belum dilibatkan secara langsung.

Nilai-nilai bersama yang dimiliki oleh suatu komunitas atau bangsa

Nilai-nilai publik berupa masukan, aspirasi, harapan atau penilaian untuk mengacu pada pengambilan keputusan yang objektif dalam menunjang kepentingan publik. Dan pencapaian realisasi program harus berdasarkan proses kebijakan dan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di lapangan terkait dengan parameter aspirasi dan keluhan dari masyarakat masih banyak yang merasa tidak puas dengan kinerja Pemerintah Desa saat ini begitupun dengan Pengelolaan BUMDES itu sendiri mereka merasa masyarakat tidak boleh tau apa yang terjadi di desa sedangkan pengurusnya sendiri tidak memberikan dampak apapun sehingga menimbulkan kecurigaan dan sifat apatis dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa aspirasi berupa keluhan dan masukan dari masyarakat sudah optimal karena masyarakat antusias menyampaikan keluhan-keluhannya terhadap pengelolaan BUMDES di desa Kaplongan Lor.

Adapun hasil wawancara penulis terkait dengan parameter realisasi program utama dari pengelolaan BUMDES saat ini sedang kurang produktif dikarenakan pengurus yang tidak aktif. Dan ada beberapa program utama diantaranya pelatihan las, pengembangan minat dan bakat (turnament), dan pemberdayaan pertanian. Berdasarkan hasil tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa realisasi program utama dari pengelolaan BUMDES masih belum berjalan dengan optimal karena masih adanya hambatan yang terjadi dilapangan.

Faktor – faktor Penghambat terwujudnya Public Value Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Pemuda

Faktor penghambat dalam tercapainya penilaian publik (kepuasan masyarakat) dapat mempengaruhi seberapa optimal pengelolaan BUMDES yang sudah dilaksanakan oleh pengurus. Hal tersebut akan menjadi acuan dalam sebuah kebijakan publik yang ada di ruang lingkup pemerintah desa kaplongan lor.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan langsung penulis bahwa ada banyak hal yang menjadi penghambat tercapainya penilaian publik yang belum optimal, hal tersebut di lihat dari sikap apatis masyarakat dan kurang aktifnya pengurus BUMDES, masyarakat yang tidak pernah dilibatkan, kerjasama pengurus yang kurang baik, sikap sentimen terhadap Masyarakat dan minimnya pengetahuan serta informasi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Public Value Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Pemuda.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Public Value Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Kaplongan Lor akan melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan nilai publik (kepuasan masyarakat) yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Pembaharuan struktur organisasni yang ada di BUMDES guna menjadikan pengurus yang lebih semangat dan memiliki tujuan yang jelas.
 2. Pengambilan keputusan yang terukur dalam menentukan tujuan sehingga pembangunan desa dapat terealisasi secara efektif dan efisien.
 3. Berkolaborasi dengan masyarakat dalam pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat sebagai objek dalam pelayanan publik yang ada di desa.
 4. Meningkatkan produktivitas dengan memilih SDM yang mumpuni sehingga dapat meningkatkan pengelolaan BUMDES untuk pemberdayaan pemuda, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
-

Memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat terkait Pengelolaan BUMDES sebagai bentuk transparansi publik.

SIMPULAN

Kesimpulannya, pengelolaan BUMDES dalam pemberdayaan pemuda di Desa Kaplongan Lor masih belum mencapai hasil yang optimal, sebagaimana terlihat dari kurangnya kepuasan masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor penghambat, antara lain kurangnya keterlibatan pemuda dalam pengelolaan BUMDES, hubungan yang tidak sinkron antara pengurus BUMDES dengan kebutuhan masyarakat, serta adanya sikap sentimen dan anti-kritik dari pihak pemerintah desa yang menghambat kemajuan. Selain itu, masih rendahnya transparansi dan komunikasi antara pengelola BUMDES, masyarakat, dan pemerintah desa menjadi kendala dalam merealisasikan tujuan pemberdayaan pemuda. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan public value BUMDES antara lain adalah pembaharuan struktur organisasi untuk menciptakan pengurus yang lebih bersemangat dan fokus pada tujuan yang jelas, pengambilan keputusan yang terukur dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pengelolaan BUMDES. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDES serta keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan BUMDES agar masyarakat dapat lebih percaya dan terlibat aktif dalam program-program yang dijalankan. Pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis pada nilai-nilai bersama serta kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai pemberdayaan pemuda yang lebih maksimal dan bermanfaat bagi kemajuan desa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2022). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. CV. Alfabeta.
- Alford, J., Hartley, J., Hughes, O., Sandfort, J., Quick, K., Richardson, G., Andersen, D., Luna-Reyes, L. F., Belfield, C. R., & Moore, M. (2015). *Public value and public administration*. Georgetown University Press.
- Creswell, J. W. (2012). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.
- De Jong, J., Douglas, S., Sicilia, M., Radnor, Z., Noordegraaf, M., & Debus, P. (2017). Instruments of value: using the analytic tools of public value theory in teaching and practice. *Public Management Review*, 19(5), 605–620.
- Dwiyanto, A. (2022). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Ugm Press.
- Kristian, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 23–37.
- Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.

Novandi Bayu Permana, Mukarto Siswoyo, Siti Khumayah

Public Value Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Kaplongan Lor
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*.

Muharman, A., Fitrisia, A., & Ofianto, O. (2023). Pergeseran Nomenklatur Administrasi Negara Menjadi Administrasi Publik. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 152–159.

Rosadi, A. A. S., & Purnomo, Y. J. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pada Pegawai PT Raudah Utama Cianjur. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 357–367.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).